

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RW
DI KECAMATAN KEDUNGWUNI
(TINJAUAN *FIQH SIYASAH*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AULIYA DEWI
NIM. 1518052

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RW
DI KECAMATAN KEDUNGWUNI
(TINJAUAN *FIQH SIYASAH*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AULIYA DEWI
NIM. 1518052

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auliya Dewi
NIM : 1518052
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemilihan Ketua RW di Kecamatan
Kedungwuni (Tinjauan *Fiqh Siyasah*)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Juli 2023

Yang Menyatakan,



AULIYA DEWI

NIM. 1518052

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M. Sy

Perum Griya Wirapurna No. B12 Menjangan Bojong
Pekalongan

Lamp. : 2 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Auliya Dewi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Auliya Dewi

NIM : 1518052

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pemilihan Ketua RW di Kecamatan
Kedungwuni (Tinjauan *Fiqh Siyasah*)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 21 Juli 2023

Pembimbing,



Achmad Umardani, M. Sy

NIP. 19840328 201903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Auliya Dewi

NIM : 1518052

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemilihan Ketua RW di Kecamatan Kedungwuni
(Tinjauan Fiqih Siyasah)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**,
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Ahmad Fauzan M.S.I
NIP. 198609162019031014

Penguji II

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007



Pekalongan, 31 Juli 2023

Disahkan oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

MOTTO

“it’s not always easy, but that’s life. Be strong because there are better days ahead”

(Mark Lee)

“tidak semua orang punya mimpi. Jika kamu benar-benar tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan di masa depan, lakukan saja apa yang harus kamu lakukan untuk saat ini. karena jika kamu melakukan lebih baik hari ini dibandingkan dengan kemarin, maka itu sudah dianggap sebagai peningkatan!”

(Huang Renjun)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala anugrah, dan limpahan rahmatnya.

Saya persembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan kesuksesan dan memberikan semangat dalam hidup, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Khususnya kepada:

Yang tersayang the only one Ibu tercinta yang selalu mendukung, menasehati, dan tidak pernah putus mendoakan untuk anaknya dari sewaktu kecil sampai sekarang telah menjadi seorang sarjana dan akan menempuh kehidupan yang baru diluar sana.

Kepada Bapak Ibu Guru, Ustad Ustadzah yang berperan dalam pembentukan karakter dan mengajarkan keilmuan yang turut berperan mengantarkan saya pada titik sekarang ini.

Kepada Bapak Ibu Dosen dan segenap civitas Akademik di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selama ini sudah memfasilitasi dalam bidang keilmuan dan turut menasehati membimbing saya selama menempuh studi.

Teruntuk Keluarga besar Hukum Tatanegara, teman, sahabat seperjuangan Mahasiswa HTN Angkatan 2018, terkhusus HTN B, dan yang paling khusus anggota kabinet rebahan maju yang selalu semangat kebersamai dan membantu di segala hal.

Teruntuk teman seorganisasi yang sudah seperti keluarga sendiri, yang mengenalkan ilmu baru, pengalaman baru, suasana baru, dan hal-hal yang baru lainnya.

Terkhusus khusus untuk teman teman dibalik layar skripsi aku, untuk segala hal yang sudah kalian berikan.

Terimakasih Banyak, persembahan ini ditujukan khusus untuk kalian. Barakallah semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian fiddun'ya wal akhiroh.

ABSTRAK

Auliya Dewi. 2023. Pelaksanaan Pemilihan Ketua RW Di Kecamatan Kedungwuni (Tinjauan *Fiqh Siyasah*). Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Achmad Umardani, M.Sy.**

Pemilihan merupakan mekanisme yang menentukan perubahan pemerintahan di pusat dan daerah ke sistem demokrasi. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan pemenuhan harapan dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum. RW tergolong organisasi pendukung yang dapat meningkatkan peran, fungsi, kesejahteraan dan partisipasi masyarakat. RW diharapkan dapat membantu pemerintah menerapkan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayahnya. Proses demokrasi dalam pemilihan ketua RW terkadang diselenggarakan dengan tidak sesuai peraturan yang ada. Sehingga penulis tertarik menulis skripsi dengan rumusan masalah bagaimana analisis pemilihan RW di kecamatan Kedungwuni? dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap pemilihan RW di kecamatan Kedungwuni?.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dengan sumber data yakni wawancara dan bahan hukum sesuai lainnya. Untuk menganalisis data hasil penelitian menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil penelitian ini praktek pemilihan ketua RW di kecamatan Kedungwuni belum sepenuhnya dilaksanakan secara langsung atau terbuka untuk masyarakat setempat, dikarenakan beberapa desa masih menerapkan sistem memilih secara musyawarah. namun berdasarkan hal tersebut proses pemilihan ketua RW sudah dilakukan dengan demokrasi.

Kata Kunci: Demokrasi, *Fiqh Siyasah*, Lembaga Masyarakat

ABSTRACT

Auliya Devi. 2023. Implementation of the Election of Heads of RW in Kedungwuni District (Review of Fiqh Siyasah). State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Achmad Umardani, M.Sy.

Elections are the mechanism that determines changes in government at the central and regional levels to a democratic system. Government of the people, by the people and for the people is the fulfillment of expectations in the implementation of the general election system. RW are classified as support organizations that can increase the role, function, welfare and participation of the community. RW are expected to be able to help the government implement it by providing the best service to the people in their area. The democratic process in selecting RW heads is sometimes not carried out according to existing regulations. So that the writer is interested in writing a thesis with the formulation of the problem how to analyze the selection of RW in Kedungwuni sub-district? and how is the siyasah dusturiyah fiqh review of the RW election in the Kedungwuni sub-district?.

The research method in this study uses empirical research with a qualitative approach, namely research procedures that produce descriptive data in the form of speech or writing and the behavior of people who are observed with data sources, namely interviews and other appropriate legal materials. To analyze the research data using data triangulation techniques.

The results of this research are that the practice of electing RW heads in the Kedungwuni sub-district has not been fully implemented directly or openly to the local community, because several villages still apply a deliberative voting system. However, based on this, the election process for the head of the RW has been carried out in a democratic manner.

Keywords: Democracy, *Siyasah Fiqh*, Community Institutions

KATA PENGANTAR


Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, M.H. selaku wali dosen;
5. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
7. Pihak Pemerintah Kecamatan Kedungwuni yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
8. Pihak Pemerintah Kelurahan Kedungwuni Barat, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kelurahan Pekajangan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
9. Pihak Ketua RW yang sudah meluangkan waktu untuk membantu saya dalam memperoleh data pelengkap penelitian ini;
10. Ibu dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral serta yang tidak putus mendoakan saya, sampai saya berada di titik ini;

11. Seluruh tenaga dosen dan staf administrasi dalam lingkup Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan;
12. Serta Sahabat dan teman teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan sudah kebersamai dari awal perkuliahan sampai sekarang;
13. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang memberikan bantuan moril serta materiil selama masa studi dan penyelesaian skripsi ini.

Demikian skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, demi kesempurnaan skripsi ini, mohon kritik dan sarannya karena tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa masukan yang diberikan. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

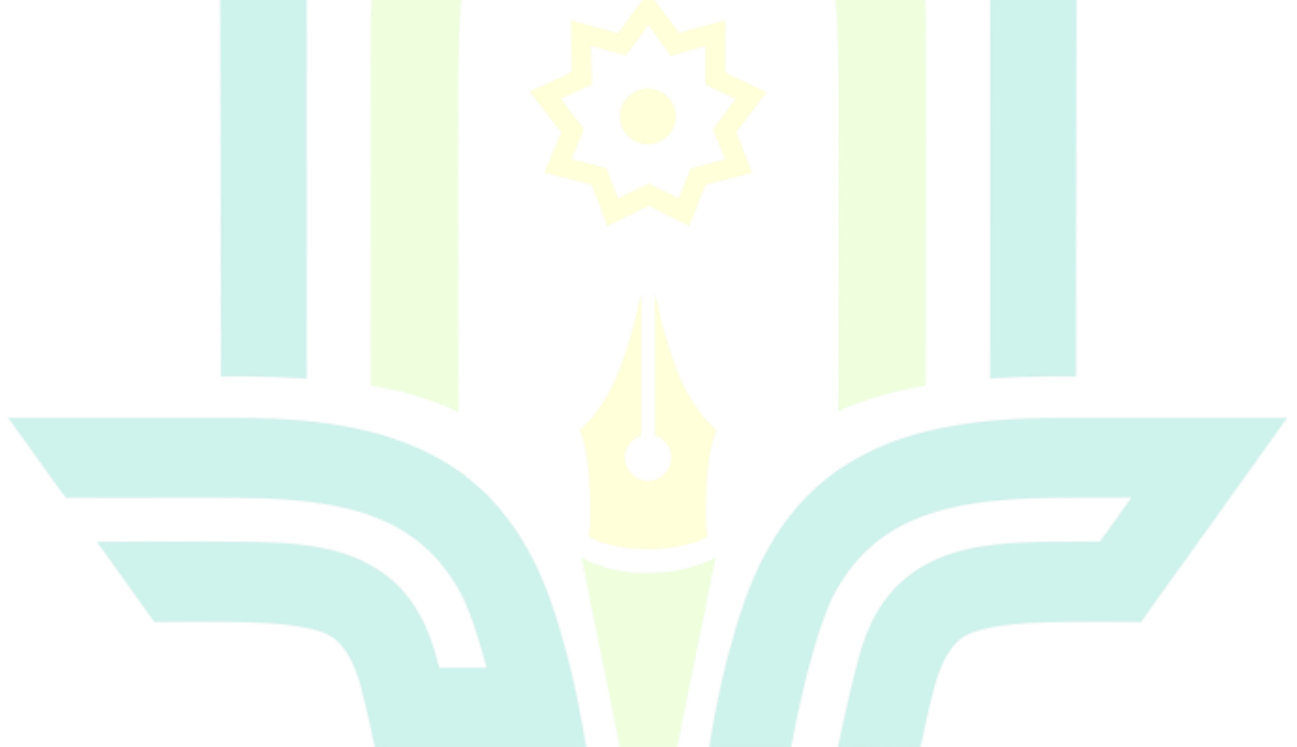
Pekalongan, 21 Juli 2023


AULIYAH DEWI
NIM. 1518052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teoretik	8
F. Penelitian Yang Relevan	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Demokrasi	22
B. <i>Fiqh Siyasah</i>	29
C. Lembaga Kemasyarakatan	41

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RW DI KECAMATAN KEDUNGWUNI.....	46
A. Gambaran umum Kecamatan Kedungwuni	46
B. Pemilihan KetuaRW di Kecamatan Kedungwnui	50
BAB IV ANALISIS PEMILIHAN KETUA RW DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.....	56
A Analisis pemilihan RW di kecamatan Kedungwuni	56
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Pelaksanaa Pemilihan Ketua RW di Kecamatan Kedungwuni.....	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan.....	14
Tabel 3.1 Jumlah Dusun, RW di Kecamatan Kedungwuni 2021.....	47
Tabel 3.2. Pemilihan RW di Kecamatan Kedungwuni	54



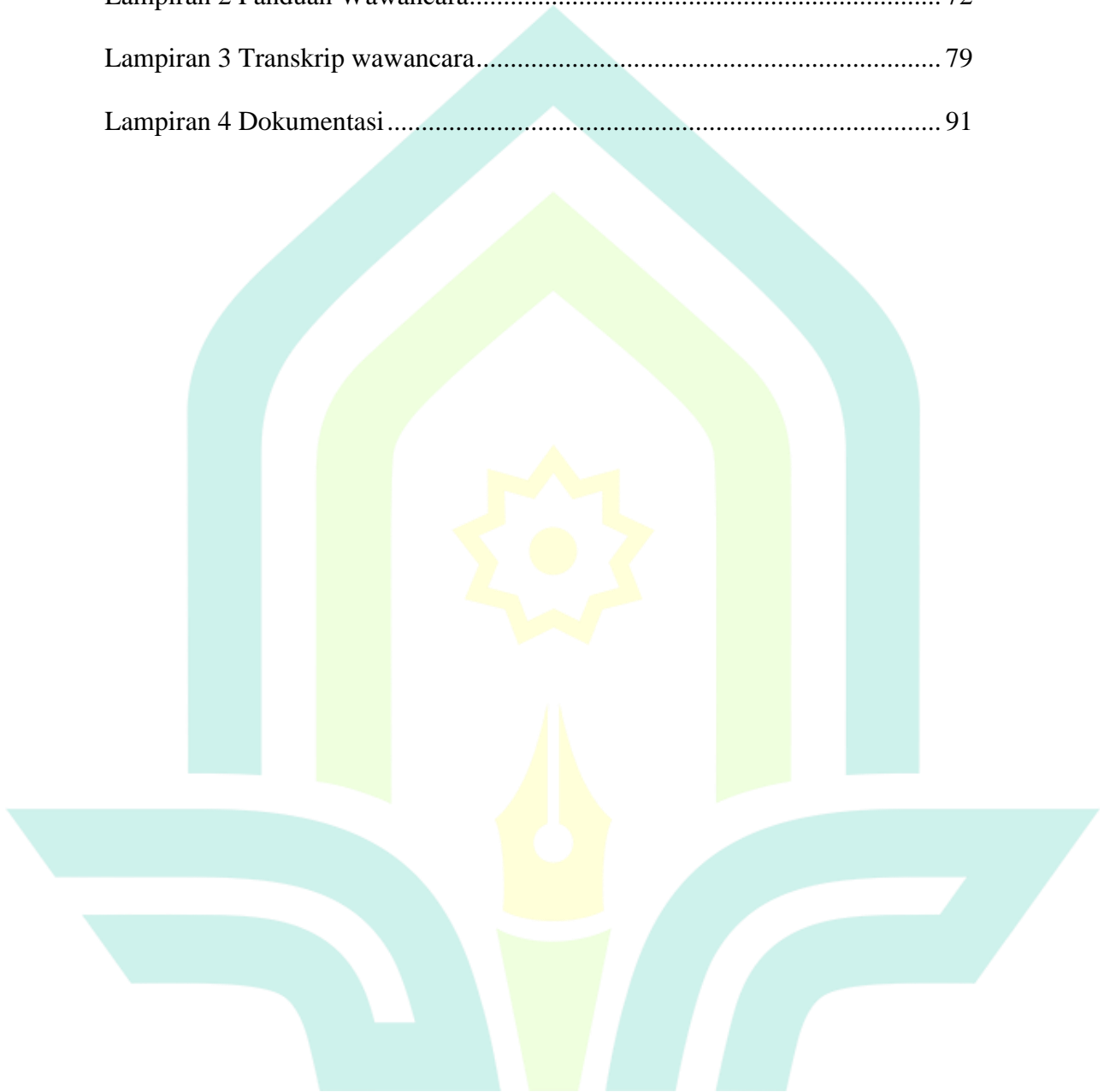
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Peta Kecamatan Kedungwuni.....	47
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kecamatan Kedungwuni	49
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Posisi RW di Tingkat Kecamatan Kedungwuni	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	71
Lampiran 2 Panduan Wawancara.....	72
Lampiran 3 Transkrip wawancara.....	79
Lampiran 4 Dokumentasi.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi. Indonesia menerapkan sistem demokrasi berdasarkan Pancasila. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersirat nilai pokok dari demokrasi Konstitusional yang mana telah ditetapkan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum.¹ Pemilihan umum ialah satu diantara sarana dari sistem demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum juga sebuah wadah dan sarana yang paling spesifik untuk mewujudkan demokrasi.² Dengan adanya pemilihan umum akan memberikan kesempatan sangat luas bagi seluruh penduduk untuk memilih calon pemimpin yang sesuai hati nurani sesuai cara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang merupakan sarana mewujudkan demokrasi.³

Pemilihan juga merupakan mekanisme yang menentukan perubahan pemerintahan di pusat dan daerah ke sistem demokrasi. Perkembangan masyarakat yang pesat, jumlah yang banyak, persebaran yang luas dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam menjadi kompleksitas persoalan yang dihadapi rakyat semakin variatif. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Saleh, "Hukum Acara Sidang Etikpenyelenggara Pemilu" (Jakarta: Sinagrafika, 2017), 49-50

³ Chusviatul Hulasoh, "*Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fiqh Siyasah*", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020. Diakses dari <https://repository.uinsaizu.ac.id>



untuk rakyat merupakan pemenuhan harapan dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum. Untuk keberhasilan dan pemeliharaan demokrasi seperti itu, ada enam kriteria atau elemen dasar yang diperlukan untuk masyarakat yang pluralisme: 1) pengetahuan tentang pluralisme; 2) konseling; 3) sesuai dengan tujuan; 4) adanya standar keadilan dan konvensi; 5) kebebasan hati nurani, persamaan hak dan kewajiban; 6) ada trial and error. Menurut UUD NRI 1945, Pasal 1 (2) harus dilaksanakan di tangan rakyat yang berdaulat berdasarkan UUD.⁴

Peraturan MENDAGRI Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 6 ayat 1 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dijelaskan “Jenis LKD paling sedikit meliputi: a) Rukun Tetangga; b) Rukun Warga; c) Karangtaruna; d) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; e) Pos Pelayanan Terpadu; dan f) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.” RW (Rukun Warga) merupakan suatu istilah yang tidak asing di telinga kita.

RW merupakan satu diantara pranata sosial yang dikuasai dan disahkan oleh negara menurut peraturan daerah atau kota di Indonesia. Meskipun RW merupakan organisasi akar rumput, mereka dekat dengan masyarakat sehingga mengerti akan situasi dan permasalahan yang timbul di masyarakat sekitarnya.

RW tergolong organisasi pendukung yang dapat meningkatkan peran, fungsi, kesejahteraan dan partisipasi masyarakat. RW administrasi

⁴ Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi, “Hukum Tata Negara Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia”, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 147

kewilayahan diharapkan dapat membantu pemerintah menerapkan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayahnya,

Kedungwuni merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kecamatan ini berjarak kira-kira 13 Km dari kota Pekalongan. Pusat pemerintahannya berada di kecamatan Kedungwuni. Secara keseluruhan wilayah ini memiliki luas 22,93 km². Penduduk di Kecamatan Kedungwuni mencapai 90.774 jiwa. Semua penduduk tersebut tersebar dalam 16 desa dan 3 kelurahan.

Dalam sistem ketatanegaraan, regenerasi pemerintahan mutlak diperlukan, yang bisa dimulai dari camat, sekretaris kecamatan hingga lembaga-lembaga di bawahnya seperti RW.

Pemilihan perangkat di tingkat kecamatan Kedungwuni mencerminkan sistem demokrasi yang diterapkan oleh negara Indonesia. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Indonesia menggunakan sistem demokrasi dimana presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan kepala desa dipilih melalui pemilihan umum bahkan sampai RW di tingkat terendah. Tercantum dalam PERBUP kabupaten Pekalongan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang dimaksudkan dalam Pasal 9 atau (2), artinya: RW sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat dicapai melalui musyawarah dan mufakat di tingkat wilayah yang dipimpin oleh pemerintah dan/atau masyarakat di wilayah tersebut atas keputusan pemerintah.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan di beberapa wilayah Indonesia khususnya di wilayah Kedungwuni, sistem demokrasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan dan banyak pemilihan RW yang ditunjuk langsung oleh pemerintah daerah atau dipilih langsung oleh warga tetapi tanpa konsultasi atau kesepakatan. Alasan memilih kecamatan kedungwuni untuk menjadi lokasi penelitian ini karena kecamatan kedungwuni merupakan kecamatan yang luas sehingga peneliti dapat mengambil sampel lebih banyak dan sudah ada beberapa kasus yang terjadi di kecamatan kedungwuni.

Ketaatan rakyat mempunyai prinsip yaitu semua rakyat wajib mentaati sistem pemerintahan. Rakyat mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan yang ada selama masa pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demokrasi dalam Islam mempunyai mekanisme atau sistem yang mendukung pelaksanaan ketentuan yang berlaku di negara yang berlandaskan hukum sesuai al-Qur'an dan sunnah tetapi bukan sesuatu yang mutlak. Dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi Islam ialah memprioritaskan masalah, maka masyarakat akan mendapatkan jalan yang tepat sesuai dengan masalah kenegaraan dan kemasyarakatan yang dihadapi.⁵

Kajian *fiqh siyasah* menunjukkan bahwa demokrasi merupakan prinsip sistem politik negara yang mencakup aturan-aturan umum. Dalam penerapan sistem pemilihan *fiqh siyasah* dapat dikualifikasi pada sistem *bai'at*. Namun,

⁵Nurul Ika Fitriya "Analisis Siyasah Dusturiyah tentang implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Tatare Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019. Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/12864/1/Skripsi%20Satria.pdf>

legitimasinya harus mempertimbangkan aspek positif dan negatif orang berdasarkan prinsip-prinsip syura. Sistem pengangkatan politik harus dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan keadaan pada periode tertentu, karena tujuan *bai'at* sejak periode awal Islam adalah untuk menciptakan hak individu masyarakat yang terbatas dan belum seluruhnya sesuai dengan konsep negara modern. Sebuah sistem yang dipergunakan bersifat terbuka, non-eksklusif serta dapat mencabut hak umatnya atau bisa menciptakan pemimpin yang otoriter.⁶

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁷

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh*

⁶ Chusviatuhulasoh, “*Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fiqh Siyasah*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020. Diakses dari https://repository.uinsaizu.ac.id/8963/2/CHUSVIATUL%20HULASOH_ETIKA%20DEMOKRASI%20DALAM%20PEMILIHAN%20KEPALA%20DESA.pdf

⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁸

Proses demokrasi dalam pemilihan ketua RW terkadang diselenggarakan dengan tidak sesuai peraturan yang ada. Dalam hal ini perlu adanya fokus dalam hukum islam atau *fiqh siyasah* pada bidang *siyasah Dusturiyah* yangmana mengkaji tentang masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga mebahas konsep konstitusi, lembaga demokrasi dan syura serta legislasi.⁹

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa diperlukan adanya pengkajian dan analisis lebih lanjut mengenai pemilihan Rukun Warga secara demokrasi. Walaupun RW merupakan struktur pemerintahan terkecil dari suatu negara, akan tetapi perannya justru sangat penting karena lebih dekat dengan masyarakat. Dalam hal ini urgensi suatu pemilihan pemimpin yaitu Ketua RW seharusnya diselenggarakan secara demokratis. selain hal tersebut sesuai dengan peraturan bupati nomor 70 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dalam praktiknya diharapkan dengan terpenuhinya penyelenggaran yang sesuai dengan peraturan tersebut dapat

⁸ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

⁹ Ali Akhbar Mas Rabbani Lubis, "Ilmu Hukum Dalam Simpul *Siyasah Dusturiyah* Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia", (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12

menghasilkan pemimpin yang baik dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya sehingga terciptanya kepemimpinan yang dapat membawa kesejahteraan bagi warga masyarakat. Melihat proses pemilihan menjadi faktor penting bagi sosok pemimpin yang dihasilkan, Sehingga urgensi dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada warga masyarakat mengenai tata cara pemilihan RW yang baik dan sesuai peraturan (pemilihan yang demokratis).

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian mendalam mengenai penerapan demokrasi pemilihan Rukun Warga di Kecamatan Kedungwuni. Untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati serta berdasarkan Tinjauan *Fiqh Siyasah* pada bidang *siyasah Dusturiyah*. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti mengkaji permasalahan tersebut dengan mengambil judul “Pelaksanaan Pemilihan Ketua RW di Kecamatan Kedungwuni(Tinjauan *Fiqh Siyasah*)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana analisis pemilihan RW di kecamatan Kedungwuni?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap pemilihan RW di kecamatan Kedungwuni?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis proses pemilihan RW di kecamatan Kedungwuni.

2. Menganalisis tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap pemilihan RW di kecamatan Kedungwuni.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut agar menghasilkan berbagai konsep ilmiah untuk kepentingan studi ilmiah, diharapkan bisa menjadi referensi atau bahan pemahaman dan pembelajaran bagi penelitian lanjutan atau pengembangan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, serta untuk mengembangkan dan memajukan demokrasi di kecamatan Kedungwuni agar memahami lebih akan urgensi memilih perangkat kecamatan, agar masyarakat berperan aktif dalam demokrasi masyarakat dan membantu regenerasi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman untuk memahami pentingnya demokrasi dalam pemilihan perangkat kecamatan Kedungwuni.

E. KERANGKA TEORETIK

1. **Demokrasi**

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani demokrasi (demokratia), artinya “pemerintahan oleh rakyat”. Demo "manusia" dan kratos berasal dari dua kata "kekuasaan atau otoritas". Dalam kamus

bahasa Indonesia, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, sehingga kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan langsung dilaksanakan oleh rakyat atau wakilnya yang dipilih melalui sistem pemilihan umum yang bebas atau visi sosial tentang persamaan hak yang diutamakan, tanggung jawab, serta seluruh warga negara memiliki hak untuk diperlakukan yang sama.

Demokrasi sebagai sebuah konsep yang bermakna luas dan mencakup banyak unsur yang bertautan. Demokrasi ialah sistem politik dan mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih salah satu pemimpin politik yang akan mencalonkan diri dalam pemilu. Kemampuan untuk memilih salah satu pemimpin dalam suatu pemilu disebut demokrasi.¹⁰ Prosedur utama demokrasi pada umumnya ditandai dengan pemilihan umum yang memungkinkan masyarakat untuk bebas memilih penguasa politik berdasarkan kontes mencari pemenang.¹¹ Karena demokrasi diartikan sebagai kompetisi, kebebasan dan partisipas, maka proses demokratisasi (mengubah sistem politik dari non-demokratis menjadi demokratis) dapat dilakukan secara kompetitif dan partisipatif.

Demokrasi akan menjadi sistem yang islami apabila kedaulatan serta kehendak rakyat tidak mempunyai sifat mutlak, melainkan harus tidak

¹⁰ Heru Nugroho, "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika SosialPolitik Indonesia", *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no.1 (2012), 2

¹¹ Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi, "Hukum Tata Negara Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia", (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 147

bertentangan dengan syariat. Keuntungan dari sistem demokrasi adalah bahwa rakyat memiliki tanggung jawab serta hak untuk mengawasi, mengontrol, menasihati, dan menilai mereka yang berkuasa.

Sistem demokrasi yang berporos pada kesetaraan, keadilan, pengawasan rakyat dan kebebasan, secara sistemis menumbuhkan tekat dikalangan warga masyarakat agar mengkritisi dan menesehati pemimpinnya.

Arend Lijphart memberikan kriteria-kriteria suatu negara digolongkan penganut demokrasi, yaitu:

- a. ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
- b. ada kebebasan menyatakan pendapat;
- c. ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
- d. ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan atau negara;
- e. ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dudukan atau suara;
- f. terdapat berbagai sumber informasi;
- g. ada pemilihan yang bebas dan jujur;
- h. semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijaksanaan pemerintah harus bergantung pada keinginan rakyat.¹²

¹² Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi, "Hukum Tata Negara Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia", (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 148

Keberadaan pemilihan umum yang bebas dan jujur adalah penanda demokratis tidaknya suatu negara. Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, diperlukan kerangka pemandu agar praktiknya tidak jauh menyimpang dari tujuan menghadirkan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum tidak bermakna sekedar procedural formal, tetapi merupakan perhelatan yang partisipatif, kompetitif, terbuka, jujur dan adil.¹³ Melalui pemilihan umum hak-hak asasi masyarakat dapat disalurkan, termasuk hak atas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan.¹⁴

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah ialah ilmu pemerintahan Islam, yang sifatnya mempertimbangkan sesuai dengan kepentingan manusia bernegara pada umumnya dan khususnya bentuk-bentuk undang-undang, peraturan dan hal-hal yang dibuat oleh pemimpin menurut ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat banyak serta menghindarkan dari segala kemudharatan yang kemungkianaan tumbuh di kehidupan masyarakat yang sedang dijalaninya.

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan lembaga negara,

¹³ Sri Hastuti P, "Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, No.25, 2004, 148

¹⁴ Mahfud MD, "Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi" (Yogyakarta: Gama Media. 1999), 221

baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁵

Dalam suatu negara, aturan atau undang-undang secara alami menjadi inti dari pemerintahan. Konstitusi menjadi hukum yang menjadi dasar hukum. Sedangkan sumber hukum Islam akan menjadi petunjuk dalam menata dan menentukan peraturan sebagai hukum yang mengikat. *Siyasah dusturiyah* memiliki pembagian didalamnya, diantaranya: a) *Siyasah Idariyah*, mencakup administrasi kenegaraan sebagai pelengkap dari jalannya pemerintahan; b) *Siyasah qadha'iyah*, merupakan peradilan dalam Islam; c) *Siyasah tasyri'iyah* membahas terkait pembuatan qanun/hukum; d) *Siyasah Tanfidziyah*, ialah pelaksanaan dari adanya hukum.¹⁶

Dalam penelitian ini tinjauan *fiqh siyasah* lebih berfokus pada bidang *Dusturiyah*, *Siyasah Dusturiyah* ialah ilmu *siyasah* yang secara spesifik membahas terkait perundang-undangan negara (legislasi, konsep konstitusi, syura dan lembaga demokrasi). *Siyasah dusturiyah* juga membahas terkait kajian konsep *rule of law* dalam *siyasah* serta hubungan symbiotik antara hak warga negara yang wajib dilindungi serta rakyat dengan pemerintah.¹⁷

¹⁵ A. Djazuli, "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatanumat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah", (Bandung: Prenada Media, 2003), 46

¹⁶ Elis Kumalawati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyasah *Dusturiyah*", *jurnal Al-Balad3*, No. 2 2021.

¹⁷ Ali Akhba baib Rabbani Lubis, "Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah *Dusturiyah* Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia", (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 14

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang luas dan kompleks. Meliputi:

- a. Permohonan dan ruang lingkup
- b. Permohonan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Permohonan bai'at
- d. Persoalan *waliyah ahdi*
- e. Persoalan perwakilan
- f. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- g. Persoalan *wazaroh* dan perbandingannya.¹⁸

3. Lembaga Kemasyarakatan

Terdapat 3 otonomi daerah di Indonesia yaitu yang pertama otonomi daerah tingkat provinsi, yang kedua otonomi daerah tingkat kabupaten/kota, dan yang ketiga adalah otonomi tingkat desa.¹⁹ Hal tersebut dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada lembaga kemasyarakatan tingkat desa terdapat RW (rukun warga).

RW merupakan lembaga paling rendah ditingkat pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Sehingga RW harus melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam pemilihan RW perlu adanya seleksi sesuai dengan peraturan yang ada. RW merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk

¹⁸ A. Djazuli, "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatanumat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah", (Bandung: Prenada Media, 2003), 74

¹⁹ Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo, Trisakti Handayani, "Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang", *Jurnal Civic Hukum* 4, no. 2 (2019), 104

melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan. RW memiliki peran yang sangat bebas dan memiliki arti penting bagi masyarakat RW karena mereka merupakan satu organisasi yang sangat dekat dengan masyarakat daripada lembaga lainnya.

F. PENELITIAN YANG RELAVAN

Penyusunan penelitian ini, penulis mencari beberapa informasi dari buku serta sumber lain baik dari jurnal, skripsi dengan maksud memperoleh sebuah informasi dan teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Serta peneliti juga mencari referensi dari penelitian terdahulu untuk dijadikan bahan acuan dan perbandingan, tentang kekurangan dan kelebihan yang sudah ada. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema yang di angkat penulis diantaranya:

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Ananda Istiqomah "Implementasi Perda Nomor 3 tahun 2018 tertadap Prasyaratn Pengurus RT dan RW Prespektif Imam Al-Mawardi (Studi di Kecamatan	Persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam pembahasan mengenai implementasi terkait peraturan dalam pemilihan RW.	Penelitian saya lebih fokus dalam proses dan prosedur pemilihan RW.

	Karanggeneng Kabupaten Lamongan) ²⁰		
2.	Alfian Ramadhan, “Dinamika Pemilihan Ketua RT (Kasus Pemilihan Ketua Rt 05 Rw 06 Kelurahan Tanjung Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru)”	Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji terkait permasalahan dalam proses pemilihan ketua RW.	Perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian saya fokus pada permasalahan dalam demokrasi pemilihan RW di kecamatan kedungwuni.
3.	Idrispatarai, Akhir Saleh, dan Burhanuddin, “Analisis Pemilihan Serentak Ketua RW Dan Ketua RT Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Etika Politik”	Persamaan dalam penelitian ini yaitu menganalisis pemilihan RW.	Dalam penelitian saya pemilihan RW tidak dilakukan serentak sehingga peneliti menggali informasi secara terpisah.
4.	Hyronimus Rowa, Florianus Aser, dengan judul “Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga	Persamaan dalam penelitian ini yaitu fokus pada kebijana dalam penatan lembaga kemasyarakatan RW.	Penelitianasn saya mengkaji kebijakan penataan lembaga kemasyarakatan melalui <i>fiqh siyasah</i> .

²⁰ Ananda Istiqomah, “Implementasi Perda Nomor 3 tahun 2018 tertadap Prasyaratan Pengurus RT dan RW Prespektif Imam Al-Mawardi (Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/20476/>

	Kemasyarakatan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kabupaten Bogor”		
5.	Henri Yandhi, dengan judul “Prototype E-Polling Berbasis Sms Gateway Pada Pemilihan Ketua Rw.06 Perum. Bugel Mas Indah”	Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji terkait demokrasi pemilihan RW.	Perbedaan dengan penelitian saya ialah penelitian saya dilakukan secara langsung tidak dilakukan dengan e-polling.

G. METODE PENELITIAN

Untuk menjadikan kegiatan ini menjadi mudah dalam penelitian ini dan mendapatkan hasil yang objektif, ilmiah dan optimal dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis telah menjabarkan beberapa metode penelitian atau langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah metode penelitian hukum yang mengkaji apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat dengan cara menelaah ketentuan hukum yang ada atau menyelidiki keadaan masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan beberapa fakta yang dijadikan sebagai data penelitian. Perlu analisis untuk . mengidentifikasi masalah yang pada

akhirnya akan mengarah pada pemecahan masalah.²¹ Studi ini mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan yang menjadi objek penelitian lapangan terkait pemilihan ketua RW.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum digunakan dalam pendekatan penelitian ini. Pendekatan hukum dapat melahirkan uraian tentang tulisan, ucapan serta pengamatan perilaku dari suatu kelompok, masyarakat, individu atau organisasi yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh, komprehensif.²²

3. Lokasi Penelitian

Lokasi ialah tempat atau wilayah yang akan diambil beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang diperlukan untuk hasil penelitian. Tempat yang dijadikan pengambilan sampel ialah beberapa desa di kecamatan Kedungwuni. Yangmana Kecamatan Kedungwuni terdiri dari 19 kecamatan yaitu: Ambukembang, Bugangan, Bugangan, Karangdowo, Kedungpatangewu, Kedungwuni barat, Kedungwuni timur, Langkap, Tosaran, Pakisputih, Podo, Rengas, Pekajangan, Rowocacing, Pajomblangan, Salakbrojo, Tangkil Kulon, Tangkil Tengah, dan Kwayangan.

²¹ Korneliusbenuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, no.1 (2020), 28

²² V Wiratna Sujarweni, "Metodologi Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami", (Yogyakarta :Pustaka Baru Pres, 2019), 19

4. Sumber Data Penelitian

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data Primer

Data primer penelitian ini dikumpulkan dalam bentuk observasi lapangan langsung dan wawancara. Data primer diberikan dalam perilaku atau gerak-gerik dan kata-kata lisan yang dilakukan oleh subjek yang bisa dipercaya, hasil wawancara terdiri dari wawancara yang dilakukan oleh panitia pelaksana pemilihan ketua RW, calon ketua RW, perangkat desa, serta warga di kecamatan Kedungwuni.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang datanya tidak langsung diberikan secara langsung kepada pengumpul data. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dari buku dan literature serta beberapa dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Syarat dapat dipilih sebagai pengurus RW, yaitu: i) beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME; ii) warga negara Indonesia; iii) setia dan taat terhadap UUD 1945 dan Pancasila serta NKRI; iv) dapat menulis dan membaca bahasa Indonesia; v) penduduk RW setempat; vi) bebas narkoba; vii) berkelakuan baik, adil, jujur, berwibawa serta cakap; viii) sehat jasmani dan rohani; dan ix) tidak dihukum setidaknya 5 tahun penjara.²³

²³ PEERBUP Pekalongan Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan desa

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- a. Wawancara, percakapan untuk mendapatkan informasi dan data, penulis mengajukan pertanyaan disusun secara sistematis yang akan dijawab oleh narasumber, terarah serta jelas sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa, ketua RW di kecamatan Kedungwuni, dan tokoh masyarakat, serta warga sekitar untuk mengambil data.
- b. Observasi, Suatu metode pengamatan dengan melihat kemudian mencatat dan mengamati tindakan dalam peristiwa yang terjadi pada keadaan sesungguhnya. Dalam teknik pengamatan ini peneliti akan melihat dan mengamati secara langsung subjek dan objek yang dikaji, sehingga memungkinkan untuk mendapat data yang sulit didapatkan dalam wawancara.
- c. Dokumentasi, Metode pengumpulan data dengan menganalisis data/dokumen yang ada kaitannya dengan pemilihan ketua RW kecamatan Kedungwuni dengan tujuan untuk mendapatkan dokumen yang benar dan diperlukan dalam melaksanakan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul selanjutnya mengolah dan menganalisis data agar memperoleh data yang akurat yang dapat dipakai

dalam menjawab pertanyaan permasalahan.²⁴ Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.²⁵

Macam-macam cara dari triangulasi antara lain :

- a. Triangulasi Sumber, mengacu pada perolehan data dari penggunaan metode yang sama namun sumber yang berbeda. Contohnya, membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

²⁴ Muslan Abdurrahman, "Sosiologi Metode Penelitian Hukum" (Malang: Umm Pres, 2009), 121.

²⁵ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta: CV. syakir Media Press, 2021), 154

- b. Triangulasi Teknik, artinya penelitian memakai teknik yang beda dalam pengumpulan data untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode uji triangulasi beserta uji triangulasi dasar dalam validasi data, seperti membandingkan data observasi dengan hasil wawancara dan dokumen yang ada.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Metodologi penulisan ini terdiri dari lima bab untuk menyusun pembahasan ini secara sistematis, pembahasan penelitian ini dapat tersusun sistematis. Adapun sistematikanya antara lain:

BAB I Pendahuluan, berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kajian teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, memaparkan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori demokrasi, dan teori *Fiqh Siyasah*

BAB III Pelaksanaan pemilihan ketua RW di Kecamatan Kedungwuni.

BAB IV Analisis pemilihan ketua RW dalam perspektif *fiqh siyasah*, membahas tentang hasil analisis terkait pemilihan pemilihan RW di kecamatan Kedungwuni dalam perspektif *fiqh siyasah*.

BAB V Penutup, yaitu meringkas hasil data yang dilakukan diuraikan pada bab-bab sebelumnya berupa kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai penerapan demokrasi dalam pemilihan RW di kecamatan Kedungwuni dapat di simpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2017 tentang kelurahan Pasal 29 (1) yaitu : Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. Penerapan demokrasi dalam rangka pemilihan ketua RW dapat dikatakan belum terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku di kabupaten Pekalongan. Dikarnakan masih banyak yang harus diperbaiki lagi, masih banyak kekurangan yang terjadi dimana-mana seperti, masih belum diterapkannya sepenuhnya peraturan yang berlaku tentang bagaimana proses pemilihan ketua RW tersebut, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana sebenarnya proses pembentukan pengurus RW yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kecamatan Kedungwuni.

Seorang ketua RW pada umumnya mengetahui dan memahami secara mendalam keadaan dari setiap warganya. Hal itu dapat terjadi karena ia sering memimpin pertemuan-pertemuan, diundang warganya untuk memberikan sambutan pada suatu acara, atau menyelesaikan

suatu pertikaian-pertikaian yang tidak jarang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Jika dalam proses pemilihan ketua RW masyarakat tidak mengetahui akan bagaimana sikap atau perilaku calon ketua RW tersebut.

2. *Fiqh siyarah dusturiyah* terhadap pelaksanaan pemilihan ketua RW di Kecamatan Kedungwuni, dikatakan sudah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Islam. Karena, Islam mengajarkan kita mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, apalagi dalam menuntukan pemimpin sebaiknya dilaksanakan dengan cara musyawarah. Dalam konsep Islam musyawarah dikenal dengan syura. Kata syura dalam bahasa indonesia menjadi musyawarah mengandung makna sesuatu yang dapat diambil dan dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syura.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terhadap pemilihan pemilihan ketua RW di kecamatan Kedungwuni, selanjutnya penulis menyampaikan beberpa saran yang dapat dilakukan pemerintah kepada masyarakat kedepannya, sebagai berikut:

1. Pemerintah kecamatan dan kelurahan perlu mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan atau prosedur pemilihan dan syarat pencalonan ketua RW agar masyarakat paham dan tahu akan adanya peraturan terekait pemilihan ketua RW.

2. Perlunya pendampingan dari kelurahan terkait pemilihan ketua RW sekitarnya.
3. Diharapkan kepada masyarakat kecamatan Kedungwuni lebih aktif lagi dalam proses demokrasi yang dilaksanakan, agar kita bisa merasakan pesta demokrasi dan dapat berpartisipasi dalam pemilihan di wilayah kecamatan Kedungwuni.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi Metode Penelitian Huku*. Malang: Umm Pres, 2009.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. syakir Media Press, 2021.
- Al-Asyi, Yusuf al-Qardhawy. *Kepemimpinan Islam; Kebijakan-kebijakan Politik Rasulullah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2016.
- Darmawati. *Demokrasi Dalam Islam, Tinjauan Fiqh Siyasah*. Makassar: Alauddin University Perss, 2013.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatanumat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- HR, Ridwan . *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenamedia Group, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Lubis, Ali Akbar Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- MD, Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: Ircisod, 2017.
- Saleh. *Hukum Acara Sidang Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinargrafika, 2017.
- Shihab, M Quraish. *Tafasir Al-Misbah; pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Situmorang, Jubair . *Politik Ketatanegaran dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*. Bandung: Pustaka Seti, 2012.

Sujarweni, V Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah*

Dipahami". Yogyakarta :Pustaka Baru Pres, 2019.

Sumodiningrat, Gunawan dan Ary Ginanjar Agustian. *Mencintai Bangsa Dan Negara Pegangan Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia*. Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008.

Sumadiono, Wahono . *Pedoman Umum Organisasi Dan Administrasi Rukun Warga Rukun Tetangga*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

Trianingsih, Anna. Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi. *Hukum Tata Negara Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Yakin, Ayang Utriza. *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: PT Nusantara Lestari Ceriapratama, 2016.

Y.S.Rahayu, Amy dan Vishnu Juwono. *Birokrasi Dan Governance: Teori, Konsep, Dan Aplikasinya*. Depok: PT Rajagrafino Persada, 2019.

Skripsi

Fitriya, Nurul Ika. "Analisis Siyasah Dusturiyah tentang implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Tatare Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019. Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/12864/1/Skripsi%20Satria.pdf>

Hulasoh, Chusviatul. "Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fiqh Siyasah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020. Diakses dari <https://repository.uinsaizu.ac.id>

Istiqomah, Ananda. "Implementasi Perda Nomor 3 tahun 2018 terhadap Prasyaratan Pengurus RT dan RW Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/20476/>

Jasmiyanti. "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fikih Siyasah". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021. Diakses dari <http://repository.iainpalopo.ac.id>

Jurnal

Azwant, Nurul. "Perancangan E-Voting berbasis Web". *Jurnal Komputer Terapan* 3. no. 2 (2017): 120.

'Afifah, Farida Nur. "Demokrasi Dalam Al-Qur'an: Implementasi Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin Stai Al-Fitrah*10, no. 1 (2020):19.

Hastuti, Sri. "Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*11, no. 25 (2004):148.

Irwantoni. "Peranan Siyâsah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama". *Jurnal AladalahX*, no. 3 (2012):3.

Korneliusbenuf dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*7, no.1 (2020):28.

Kumalawati, Elis. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif *Siyasah Dusturiyah*." *jurnal Al-Balad*3, no. 2 (2021).

Layuk, Merwy Rande. "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara". *eJournal Ilmu Pemerintahan*1, no.1 (2013): 166.

Nugroho, Heru. "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika SosialPolitik Indonesia" *Jurnal Pemikiran Sosiologi*1, no.1 (2012):2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Bupti Pekalongan Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Wawancara

Dakwan. Diwawancarai oleh Auliya Dewi, ketua RW 08 Prawasan Timur, Kedungwuni, 28 Mei 2023.

Dina. Diwawancarai oleh Auliya Dewi, Panitia Pemilihan RW 10 Gembong Beringin, Kedungwuni, 12 Juni 2023.

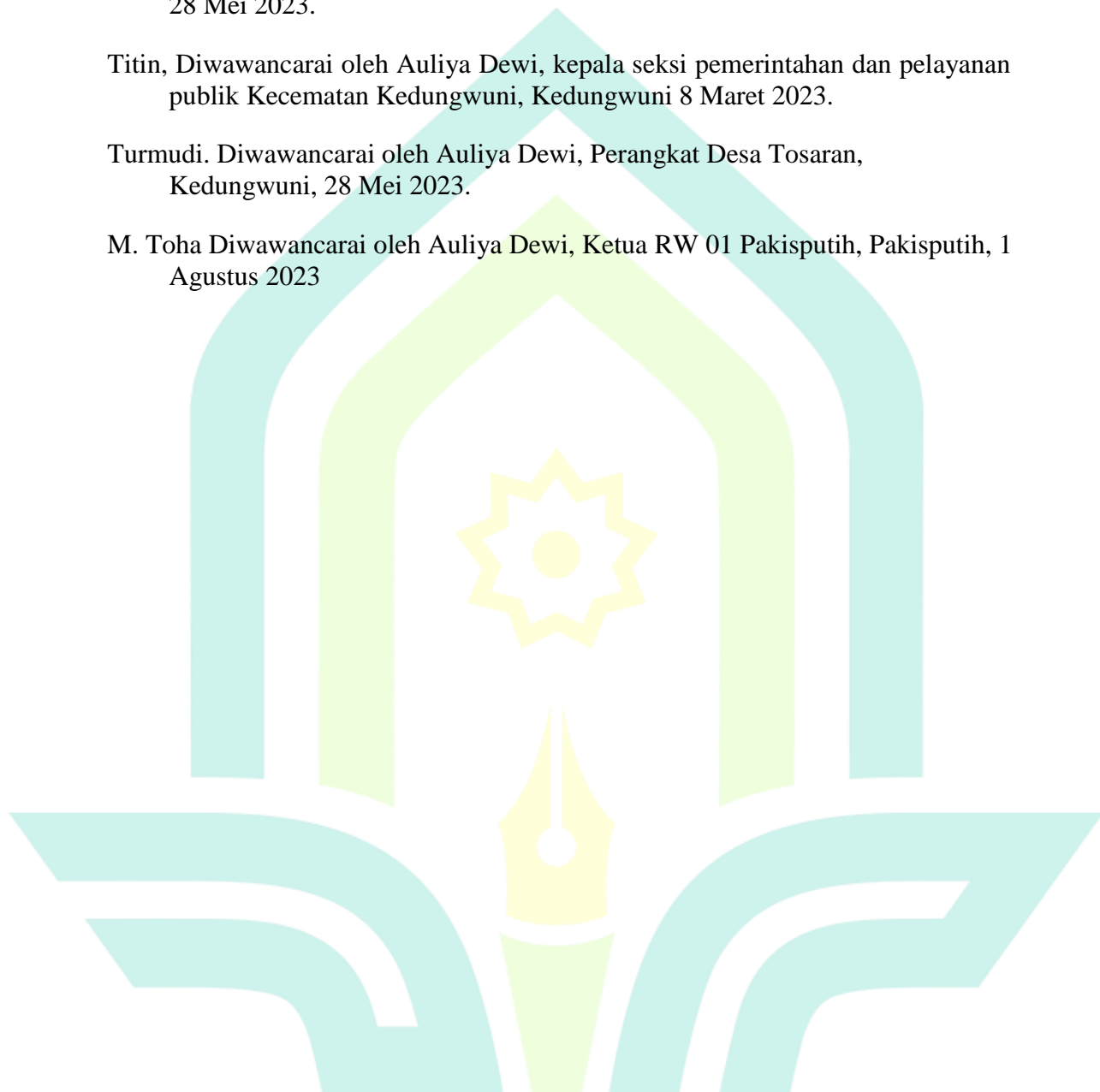
Palal. Diwawancarai oleh Auliya Dewi, ketua RW 02 Bugangan, Kedungwuni, 7 Juni 2023.

Sahil. Diwawancarai oleh Auliya Dewi, ketua RW 02 Pekajangan, Kedungwuni, 28 Mei 2023.

Titin, Diwawancarai oleh Auliya Dewi, kepala seksi pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Kedungwuni, Kedungwuni 8 Maret 2023.

Turmudi. Diwawancarai oleh Auliya Dewi, Perangkat Desa Tosaran, Kedungwuni, 28 Mei 2023.

M. Toha Diwawancarai oleh Auliya Dewi, Ketua RW 01 Pakisputih, Pakisputih, 1 Agustus 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama : Auliya Dewi
2. Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 29 Juli 2000
3. Jenis kelamin : Pekalongan
4. Agama : Islam
5. No. Hp : 0895422755408
6. Alamat : Gembong Selatan
7. Nama ayah : Moh. Noviar (alm)
8. Nama Ibu : Nur Lailiyah
9. Pekerjaan : Penjahit

B. Riwayat Pendidikan

1. RA TK Muslimat NU : 2006-2007
2. SD N 03 Kedungwuni : 2007-2013
3. SMP 02 Kedungwuni : 2013-2015
4. SMK Muhammadiyah Bligo : 2015-2018
5. UIN Pekalongan : 2018-2023

C. Riwayat Organisasi

1. HMJ Hukum Tatanegara : 2019-2020
2. DEMA Fakultas Syariah : 2020-2021
3. PMII Rayon Syariah : 2020-2021
4. DEMA UIN Pekalongan : 2021-2022